

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER
ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

SISTEMATIKA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA
BAB III AKUNTABILITAS
BAB IV RESPONSIBILITAS DAN INDEPENDENSI
BAB V TRANSPARANSI
BAB VI PENUTUP

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya *Good Governance* dalam penyediaan pelayanan publik merupakan prasyarat utama bagi Instansi Pemerintah dalam upayanya mewujudkan aspirasi masyarakat. Maka dari itu diperlukan sebuah system yang dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Instansi Pemerintah yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sebab setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kadaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RSUD dr. Achmad Diponegoro merupakan salah satu institusi pelayan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang memberikan berbagai jenis pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena perannya tersebut maka RSUD dr. Achmad Diponegoro perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan melalui sebuah format tata kelola rumah sakit yang mengedepankan prinsip-prinsip penatakelolaan yang transparan, akuntabel dan independen.

Sebagai langkah awal dari harapan tersebut maka disusunlah Pola Tata Kelola RSUD dr. Achmad Diponegoro sebagai salah satu wujud persiapan mendasar RSUD dr. Achmad Diponegoro apabila menjadi BLUD sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Berdasarkan hal tersebut di atas diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pemilik RSUD dr. Achmad Diponegoro dapat lebih memberdayakan RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan memberikan otonomi dalam pengelolaan rumah sakit sehingga pihak manajemen mempunyai peran, wewenang dan tanggung jawab operasional yang lebih besar dengan harapan dapat lebih fleksibel dalam mengadakan perubahan khususnya dalam Pola Pengelolaan Keuangan.

Dengan adanya Pola Tata Kelola ini diharapkan kinerja Pelayanan Kesehatan yang disediakan RSUD dr. Achmad Diponegoro dapat lebih meningkat sehingga manfaatnya secara langsung dapat dirasakan masyarakat dan tentunya diharapkan pula dapat meningkatkan *profitabilitas* sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para karyawan.

Demikian pola tata kelola disusun untuk menjadi acuan dasar pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. Achmad Diponegoro dalam memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan rujukan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau,
BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	
1.2	Maksud dan Tujuan Penyusunan Pola Tata Kelola	
1.3	Tata Kelola	
1.4	Gambaran Kondisi Umum	
1.5	Sistematika Penulisan	
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA		
2.1	Bagian Struktur Organisasi	
2.2	Tugas Pokok dan Fungsi Organ Kerja	
2.3	RSUD dr. Achmad Diponegoro	
2.4	Hubungan Kerja	
2.5	Prosedur Kerja	
2.6	Pengembangan Organisasi Setelah BLUD	
2.7	Persyaratan Jabatan	
2.8	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	
BAB III AKUNTABILITAS		
3.1	Visi dan Misi RSUD dr. Achmad Diponegoro	
3.2	Cara Pencapaian Tujuan Lima Tahun Ke Depan	
3.3	Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja	
BAB IV RESPONSIBILITAS DAN INDEPENDENSI		
4.1	Kebijakan Pengelolaan Keuangan	
4.2	Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	
4.3	Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Limbah	
BAB V TRANSPARANSI		
5.1	Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospitably Laws</i>)	
5.2	Peraturan Staf Medik (<i>Medical Staf by Laws</i>)	
BAB VI PENUTUP		